

Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang Kabupaten Sidenreng Rappang

Dian^{1*}, Muhammad Rais Rahmat², Irwan³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.308>

*Correspondence: Dian

Email: dayenftmwti@gmail.com

Received: 28-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 09-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Media sosial, yang semakin berkembang, memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial belum digunakan secara maksimal di Desa Kalempang, potensi penggunaan media sosial untuk memperkuat interaktivitas, transparansi, dan kolaborasi sangat besar. Masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, mengawasi penggunaan Dana Desa, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan Desa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Keywords: Media Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Interaktivitas

Abstract: *The importance of increasing community participation in the management of Village Funds in Kalempang Village. Social media, which is growing, has great potential in increasing transparency and active participation of the public. This study aims to analyze the use of social media in strengthening community participation in the management of Village Funds in Kalempang Village. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that although social media has not been used optimally in Kalempang Village, the potential for using social media to strengthen interactivity, transparency, and collaboration is very large. The community can be more active in providing input, supervising the use of Village Funds, and participating in decision-making related to village development. The implications of this study show that increasing the use of social media by village governments can significantly increase community participation, which in turn can strengthen more accountable and transparent management of Village Funds.*

Keywords: *Social Media, Community Participation, Village Fund Management, Transparency, Interactivity*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam cara mengelola Dana Desa.

Media sosial, yang semakin berkembang, telah menjadi alat yang penting untuk memberdayakan masyarakat. Di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya Desa, salah satunya adalah Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan partisipatif merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Namun, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan seringkali menjadi tantangan. (Nurfitri & Ratnawati, 2023)

Pengelolaan Dana Desa merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tingkat Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa, pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan Desa. Meskipun Dana Desa memberikan peluang besar untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup, pengelolaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Dalam teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh *Cohen, J. and Uphoff* (1980), didefinisikan sebagai suatu proses di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi pembangunan yang dilakukan di Desa mereka. *Jim and Uphoff* membedakan antara dua jenis partisipasi, yaitu partisipasi instrumen dan partisipasi tujuan. Partisipasi instrumen berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses yang lebih teknis, seperti Pengelolaan Dana Desa, sementara partisipasi tujuan mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini, media sosial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kedua jenis partisipasi tersebut, baik melalui penyebaran informasi yang transparan maupun melalui interaksi langsung antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Melalui informasi yang diperoleh dari media sosial mengenai Dana Desa, dapat meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tetap sesuai dengan tujuan. Media sosial bisa menjadi alat untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal ini bisa memberikan dampak nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa perlu memanfaatkan media sosial untuk memberikan

informasi kepada masyarakat mengenai sejauh mana Dana Desa telah diserap. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam mengelola media sosial. Konsep tata kelola media sosial (*Social Media Governance*) bertujuan mempercepat pembentukan praktik komunikasi partisipatoris berbasis kewargaan (Arianto, 2023a).

Media Sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet yang didasarkan pada ideologi web 2.0 dan memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten buatan mereka. Saat ini banyak komunitas sosial yang menggunakan media sosial sebagai ujung tombak dalam menyebarkan informasi. Peran media sosial saat ini sangat diperlukan, transformasi media sosial membuka peluang persebaran informasi yang cepat. Apalagi sikap masyarakat yang cenderung terikat pada media sosial. Hal tersebut menjadi alasan mengapa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran jalannya aksi komunitas sosial (Kurnia Andhani et al., 2023). Namun kendala dalam merealisasikan program Dana Desa tidak hanya berasal dari Pemerintah dan Masyarakat Desa sendiri, tetapi juga dapat datang dari pihak luar dan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan solusi yang tepat agar Pengelolaan Dana Desa dapat dimaksimalkan (Citra Permatasari, 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pemanfaatan media sosial dalam Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dan ini memicu berbagai masalah, salah satunya adalah belum aktifnya website Desa Kalempang. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa Kalempang “mengapa website Desa tidak digunakan dikarenakan tidak di anggarkan di pembaharuan tiap tahun.”

Media sosial, menurut (Suratnoaji & Yuli, 2019), Pada dasarnya media sosial adalah sejumlah alat online yang mendukung interaksi sosial antar pengguna. Istilah ini sedikit berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan kepada banyak orang namun tidak memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna. Media sosial mengubah komunikasi yang satu arah menjadi komunikasi yang saling berinteraksi. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi media sosial yang terus memperhatikan kondisi sosial pengguna. Contoh media sosial yang berkembang saat ini adalah email, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya.

Kaplan & Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan bertukar konten serta berinteraksi dengan orang lain dalam jaringan sosial. Penggunaan media sosial saat ini menjadi semakin luas, dengan pengguna aktif di berbagai platform yang berperan tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta konten (Kasus et al., 2021). Dengan demikian, media sosial memiliki potensi untuk memperkuat interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal penyebaran informasi, serta memungkinkan

masyarakat untuk terlibat langsung dalam berbagai proses pengambilan keputusan(Harahap et al., 2024).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan Desa. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi(noviar dkk, 2023). Menurut (Bakrie, 2007), partisipasi mengacu pada peran aktif masyarakat dalam rangkaian tahapan suatu program, baik dalam bentuk kontribusi gagasan, tenaga, waktu, maupun materi. Hal ini penting karena keterlibatan masyarakat dapat memperkuat hasil pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Cohen and Uphoff (1980) yang dikutip oleh (Anwar, 2022) membedakan partisipasi menjadi empat jenis: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Menurut Solekhan dalam (Razak & Harfiah, 2018) mengatakan bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. *Kaplan dan Haenlein* (2010) dalam (Tanjung Sari et al., 2024) menjelaskan peran media sosial sebagai platform berbasis Web 2.0 yang memungkinkan komunikasi interaktif, penciptaan konten oleh pengguna, dan pertukaran informasi

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. *Cohen and Uphoff* (1980) dalam teori mereka membedakan antara dua jenis partisipasi: partisipasi instrumen yang berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses-proses teknis, seperti pengelolaan Dana Desa, dan partisipasi tujuan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Media sosial dapat memperkuat kedua jenis partisipasi ini. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan Dana Desa dan berpartisipasi dalam pengawasan serta memberikan masukan. Selain itu, media sosial juga membuka ruang untuk diskusi publik yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan Dana Desa adalah kebijakan penting yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan penyaluran dana yang cukup besar kepada Desa untuk digunakan dalam membangun sarana dan prasarana, mendorong keterlibatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, untuk memastikan Dana Desa dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (Astuti, 2016). Melalui platform media sosial, pemerintah desa dapat menyebarkan informasi terkait penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta laporan hasil kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. (Arianto, 2023) menunjukkan bahwa dengan adanya tata kelola media sosial yang baik, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat ditingkatkan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan umpan balik secara langsung, yang pada gilirannya memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel (Andni & Hidayah, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang didasarkan pada pemikiran postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, bukan dalam kondisi terkontrol seperti eksperimen. Dalam metode ini, peneliti menjadi alat utama dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alamiah untuk memahami fenomena tentang peran media sosial sebagai sarana pemberdayaan. Media sosial digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Kalempong dalam Pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada makna, proses, dan pengalaman masyarakat terkait fenomena yang diteliti (Istiqamah et al., 2024).

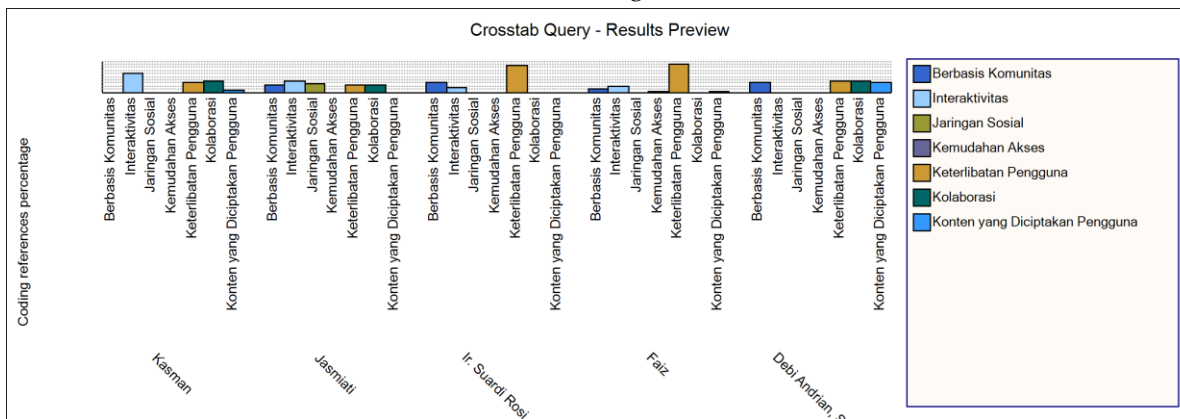
Menurut (Sugiyono, 2020) ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian, perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku yang sesuai dengan situasi yang ada. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala Desa, perangkat Desa, Sekretaris BPD dan masyarakat yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara (Mouwn Erland, 2020). Dokumentasi digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data dari sumber penelitian, yang dapat berupa dokumen elektronik (rekaman), gambar atau foto (Muhammad Hasan et al., 2023). Penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, metode ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian dan mempertimbangkan kategori partisipan yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendukung penyelidikan yang dilakukan.

Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan menjadi unit, mensintetiskan, menyusun dalam pola dan memilih apa yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dipenuhi oleh orang maupun diri sendiri. Teknik analisis data

yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan pemanfaatan aplikasi Nvivo 12 Plus. Aplikasi Nvivo merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu peneliti menganalisis data penelitian kualitatif, sebagai alat pengolah data yang bisa dalam berbagai bentuk seperti data media sosial, catatan lapangan, wawancara audio atau video, survei dan juga artikel jurnal (Medica et al., 2020). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Abdussamad, 2021) Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* data *display* dan *conclusion drawing*.

Hasil dan Pembahasan

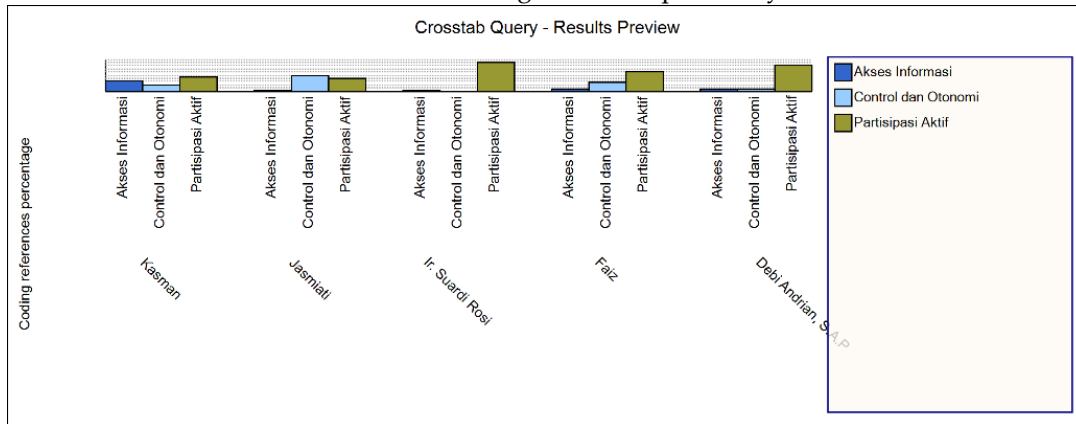
Tabel 1: Visualisasi Diagram Media Sosial



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus diperoleh visualisasi berupa diagram “Media Sosial” seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Croostab Query, yaitu alat bantu Nvivo 12 Plus yang berfungsi untuk menelusuri hubungan antar tema. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator media sosial terlihat jelas bahwa keterlibatan pengguna menjadi indikator yang paling dominan dari kelima informan pada pemanfaatan media sosial dengan persentase mencapai 40%, sedangkan interaktivitas memiliki persentase keseluruhan mencapai 20%, kemudian berbasis komunitas memiliki persentase 15%, selanjutnya kolaborasi memiliki persentase keseluruhan mencapai 14%, selanjutnya konten yang diciptakan memiliki persentase keseluruhan mencapai 6%, dan indikator yang memiliki persentase terendah yakni kemudahan akses dan jaringan sosial dengan persentase yang sama yakni 4%.

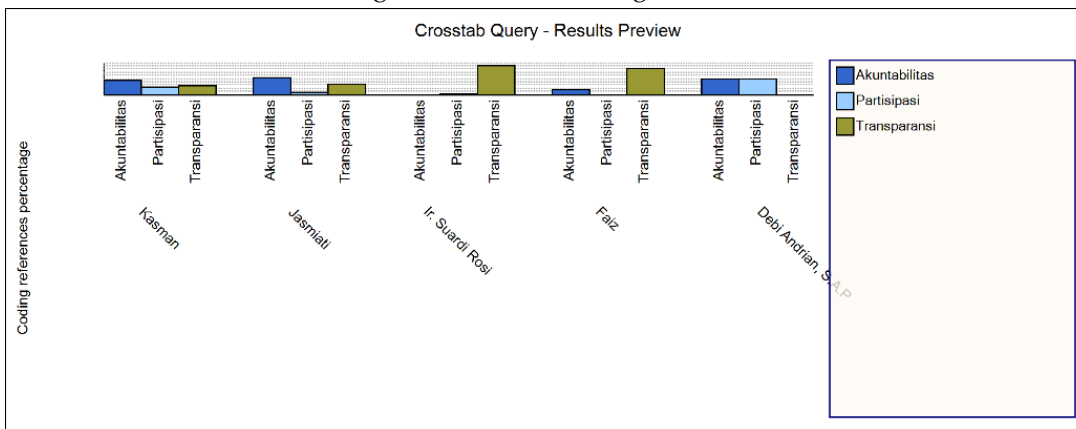
Tabel 2: Visualisasi Diagram Partisipasi Masyarakat



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus diperoleh visualisasi berupa diagram “Partisipasi Masyarakat” seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Croostab Query, yaitu alat bantu Nvivo 12 Plus yang berfungsi untuk menelusuri hubungan antar tema. Dilihat dari hasil analisis partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif menjadi partisipasi masyarakat yang dominan dari kelima informan dalam Pengelolaan Dana Desa. Dilihat dari ketiga partisipasi masyarakat akses informasi memiliki persentase paling tinggi mencapai 58%, sedangkan pada control dan otonomi mencapai 33%, kemudian untuk partisipasi masyarakat yang memiliki persentase paling rendah ialah akses informasi dengan angka persentase sebesar 9%.

Tabel 3: Diagram Viasualisasi Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2025

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif menggunakan perangkat lunak *Nvivo 12 Plus* diperoleh visualisasi berupa diagram “Pengelolaan Dana Desa” seperti yang ditampilkan pada gambar di atas. Analisis ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur *Croostab Query*, yaitu alat bantu *Nvivo 12 Plus* yang berfungsi untuk menelusuri hubungan antar tema. Dapat disimpulkan bahwa dari indikator Pengelolaan Dana Desa terlihat jelas bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator yang paling dominan dari kelima informan dalam Pengelolaan Dana Desa Kalempang dengan persentase keseluruhan yang sama yaitu 42%, dan indikator yang memiliki persentase terendah yaitu akuntabilitas dengan persentase mencapai 17%.

Indikator Bagaimana Media Sosial di Desa kalempang

Pemanfaatan media sosial dalam Pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang di kalangan Pemerintah Desa mengenai potensi besar media sosial dalam meningkatkan transparansi, komunikasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun saat ini media sosial belum digunakan secara maksimal, Pemerintah Desa Kalempang menyadari bahwa media sosial bisa mempercepat komunikasi dan mempermudah penyebaran informasi berkaitan dengan penggunaan Dana Desa di Desa Kalempang. Hal ini sesuai dengan pandangan Kaplan & Haenlein, (2010) yang mengemukakan bahwa media sosial memungkinkan interaktivitas yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah, pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa.

Sebagai contoh, Sekretaris BPD, Ibu Jasmianti, mengungkapkan bahwa meskipun Desa Kalempang belum memiliki media sosial resmi, mereka menyadari pentingnya media sosial sebagai alat komunikasi agar lebih efisien untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini pula sejalan dengan hasil temuan menunjukkan bahwa Andhani, (2023) menyatakan bahwa media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran publik. Temuan ini juga mendukung temuan penelitian oleh (Arianto, 2023a) yang mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial dapat memperkuat akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, meskipun media sosial di Desa Kalempang belum dioptimalkan, ada potensi besar bagi Pemerintah Desa untuk memperkenalkan dan memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai platform yang dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah akses informasi kepada masyarakat.

Indikator Bagaimana Partisipasi Masyarakat di Desa kalempang

Partisipasi masyarakat menurut *Jim Ife* memandang partisipasi sebagai proses yang melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap kehidupan sosial dan pembangunan. *Ife* (1997) mengklasifikasikan bahwa partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif individu

atau kelompok pada proses pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Saputra & Kusumawardani (2024) menemukan bahwa meskipun transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat masih terbatas dan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan penelitian ini mendukung temuan namun memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperbesar partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya media sosial, masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terkait Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, temuan dari (Arianto, 2023a) yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa juga menemukan relevansinya pada penelitian ini. Sejalan dengan hasil temuan mendukung pentingnya transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa, tetapi memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat Kalempong untuk berpartisipasi secara langsung dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program yang dibiayai oleh Dana Desa.

Namun, penelitian ini juga menantang temuan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada keterbatasan dalam Pengelolaan Dana Desa yang bersifat *top-down*. Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa, teori *Jim Ife* dapat diterapkan untuk menganalisis tiga indikator utama partisipasi masyarakat, yaitu akses informasi, control dan otonomi, serta partisipasi aktif.

Indikator Bagaimana Peran Media Sosial Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa Kalempong menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian atau temuan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan media sosial belum maksimal, ada rencana untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi terkait anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Hal ini mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam permendagri nomor 47 (2015) yang mengamanatkan agar Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini meskipun Desa Kalempong belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial, ada kesadaran akan potensinya untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi pada masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Razak et al., 2024) yang menunjukkan bahwa integrasi media sosial dalam Pengelolaan Dana Desa dapat memperkuat pengawasan

publik dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Meskipun tantangan teknologi masih ada, media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan hasil temuan (Arianto, 2023a) yang menekankan bahwa media sosial dapat memperkuat akuntabilitas, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memperkenalkan media sosial sebagai platform informasi, masyarakat dapat memantau pelaksanaan penggunaan Dana Desa secara lebih langsung. Meskipun saat ini penggunaan media sosial di Desa Kalempang terbatas, Kepala Desa dan perangkat Desa menunjukkan kesadaran bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat komunikasi dua arah yang lebih efektif. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya berpotensi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, tetapi juga dapat memperkuat kontrol masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa, selama ini terbatas pada pertemuan fisik atau baliho.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Meskipun saat ini pemanfaatannya masih terbatas, terdapat kesadaran yang berkembang di kalangan Pemerintah Desa mengenai pentingnya media sosial untuk mempercepat penyebaran informasi dan memperluas keterlibatan masyarakat.

Implikasi penting dari temuan ini bahwa penggunaan media sosial yang lebih aktif bisa menaikkan interaksi antara Pemerintah Desa, warga dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis masyarakat. Ini juga dapat menaikkan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, yang sebelumnya terbatas di pertemuan fisik atau baliho. Untuk itu, disarankan supaya Pemerintah Desa Kalempang segera mengaktifkan media sosial resmi dan menyediakan pelatihan bagi aparatur Desa tentang pengelolaan media sosial agar lebih efektif. Pemerintah Desa pula perlu membuat ruang untuk interaksi dua arah serta umpan balik masyarakat. Memanfaatkan media sosial partisipasi masyarakat dapat lebih terlibat pada proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana.

Pemerintah Desa Kalempang perlu segera mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan media sosial, agar komunikasi dan interaksi dengan masyarakat menjadi lebih efisien. Peningkatan kompetensi aparat desa dalam mengelola media sosial sangat penting untuk mendukung proses ini. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan literasi digital di kalangan warga Desa. Dengan memanfaatkan media sosial secara maksimal. Saran untuk peneliti

selanjutnya ialah untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial pada pengelolaan Dana Desa, serta melakukan perbandingan antara Desa yang sudah mengaktifkan media sosial dan yang belum. Peneliti selanjutnya juga bisa fokus pada dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial terhadap pengelolaan Dana Desa, transparansi serta partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). *Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village (Implementation of Village Fund Management Principles in Realizing Good Financial Government of Village)*. 2(2), 93–98.
- Anwar, A. (2022). *Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan*. 3.
- Arianto, B. (2023a). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.20885/rla.vol3.iss1.art4>
- Arianto, B. (2023b). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106–127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Astuti, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Bakrie, A. (2007). *program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327>
- Cohen, J. and Uphoff, N. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*.
- Harahap, H. R., Turmuzi, A., Manik, C. R., Hafiz, M., & Purba, D. Z. (2024). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Interaksi Sosial dikalangan Mahasiswa*. 15, 24–33. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v15i1.8908>
- Istiqamah, N., Razak, A. R., & Wardah, W. (2024). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 5.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kasus, S., Tiktok, A., Informasi, S., Teknik, F., Bina, U., & Informatika, S. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa*

- Pandemi Covid-19 Yogyakarta In The Pandemic Time Of Covid-19.* 12, 65–71. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i1.10132>
- Kurnia Andhani, A., Na, R., Husniah, imul, & Ari Saputra, M. (2023). Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Peran Komunitas MRI dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional*, 1571–1581.
- Medica, P., Husada, F., Ustiawaty, J., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Mouwn Erland. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Muhammad Hasan, T. K. H., Syahrial Hasibuan, I. R., Sitti Zuhaerah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- noviar, Idham, priyanti, E. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur.* 3, 18–33. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929.2>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Undang-undang, P. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2015). *PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 tentang Desa*.
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan Good Governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 476–496.
- Razak, M. R. R., Sofyan, B., Sofyan, W., Lubis, S., & Rais, T. R. (2024). Development of integrated village fund governance model with siberas public service application. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 2184–2198. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>
- Saputra, A. V., & Kusumawardani, A. (2024). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis participation in village fund management on community empowerment in Bergas Kidul Village , Semarang Regency.* 17(2), 164–175.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* (p. 334).

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Suratnoaji, C., & Yuli, N. (2019). *Buku metode analisis media sosial berbasis big data*.

Tanjungsari, K., Sumedang, K., Qisty, J., Fa, A., Centia, S., & Zainuddin, Z. I. (2024). *Tata Kelola Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Gudang Desa Gudang*. 6, 268–274.